

## Daftar Pustaka

### A. Sumber Buku

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ali masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta 1985

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2007

Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997,

Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Group Jakarta, 2011

Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013,

Chazawi Adami, *hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2003

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Deni RM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, mandar maju, Jakarta, 1994.

Denny Indrayana, *Hukum Disarang Koruptor*, Kompas media nusantara, Jakarta, tahun 2008.

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2007

M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997

Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana Cetakan ke 3*, alumni, Bandung, 2005

Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2005

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, mandar maju, Bandung, 2004.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung. 1992

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suhadibroto, *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2005

Widodo, *Pengintegrasian Kebijakan Kriminal Terhadap Korupsi Di Indonesia Tahun 2008*.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung Tahun 2000.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat .

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).

Undang-undang Tindak Pidana korupsi Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### C. Sumber Lain

[Antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-berikan-efek-jera-koruptor](http://Antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-berikan-efek-jera-koruptor) di (diakses 18 Agustus tahun 2015)

Artikel Ilmiah Univ Brawijaya. M.Diaz Khoirulloh,2014, Implikasi Yuridis Surat Edaran Kejaksaan Agung no B-1113/f/fd.1/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Korupsi ( internet dengan link alamat [Https://.download.portalgaruda.org/article.php](https://download.portalgaruda.org/article.php) .diakses tahun 2014 )

Emerson Yuntho, *Melemahnya Efek Jera Pemberantasan Korupsi*, Opini, Jawa Pos. (diakses Jum'at, 27 Februari tahun 2009)

[Gatra.com/hukum-1/46898-restorative-justice,-jaksa-tak-tangani-pidana-kecil.html](http://Gatra.com/hukum-1/46898-restorative-justice,-jaksa-tak-tangani-pidana-kecil.html) diakses (10 februari tahun 2014)

Harian Surat kabar Tribun Timur (diakses 2 Februari tahun 2014)

[Infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7990&l=lakukan-evaluasi-internal-kejari-wates-tak-lagi-bidik-kasus-korupsi-kelas-teri](http://Infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7990&l=lakukan-evaluasi-internal-kejari-wates-tak-lagi-bidik-kasus-korupsi-kelas-teri) ( diakses 27 September tahun 2013)

Jurnal hukum peranan BPKP mengitung kerugian keuangan negara

Sumber Lembaga Bantuan Hukum Kahmi kota Karawang (diakses sabtu 08 februari tahun 2014)

[Metro tv news.com](http://Metro.tv/news.com) Transparency International ( diakses pada Rabu, 19 februari 2014 07:49:15)

[News.metrotvnews.com/read/2014/01/29/211791/list.html](http://News.metrotvnews.com/read/2014/01/29/211791/list.html) ( diakses 29 Januari tahun 2014)

[Rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/](http://Rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemidanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/) (diakses 2 Juni tahun 2015)

Suhadibroto, Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum, Makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan Dielenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta, (diakses 28-30 Juni, tahun 2004)

Surat Edaran Kejaksaan Agung No B-1113/f/f.d.1/05/2010

Tuty Budhi Utami, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging" Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (diakses tahun 2007)

<https://JurnalIlmuHukum/digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2> (diakses 27 Maret tahun 2012)

Kabar jagadnews.comOkuoke.com/berita-kembalikan-uang-ko  
Surat Edaran Kejaksaan Agung No B-1113/F/F.d.1/05/2010.  
(diakses 09 Februari tahun 2013)